

DEPARTEMEN AGRIBISNIS
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR



PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Kristalisasi Paradigma Agribisnis
dalam Pembangunan Ekonomi dan Pendidikan Tinggi

IPB INTERNATIONAL CONVENTION CENTER – BOGOR
18 APRIL 2015

Editor

Nunung Kusnadi
Amzul Rifin
Anna Fariyanti
Netti Tinaprilla
Burhanuddin
Maryono



Prosiding Seminar Nasional

KRISTALISASI PARADIGMA AGRIBISNIS DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENDIDIKAN TINGGI

IPB INTERNATIONAL CONVENTION CENTER – BOGOR
18 APRIL 2015

Prosiding Seminar Nasional

KRISTALISASI PARADIGMA AGRIBISNIS DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENDIDIKAN TINGGI

IPB INTERNATIONAL CONVENTION CENTER – BOGOR
18 APRIL 2015

EDITOR :

NUNUNG KUSNADI
AMZUL RIFIN
ANNA FARIYANTI
NETTI TINAPRILLA
BURHANUDDIN
MARYONO

Prosiding Seminar Nasional
Kristalisasi Paradigma Agribisnis dalam Pembangunan Ekonomi dan Pendidikan Tinggi

IPB International Convention Center – Bogor
18 April 2015

Tim Penyusun

Editor :

- Dr. Ir. Nunung Kusnadi, M.S
- Dr. Amzul Rifin, S.P, M.A
- Dr. Ir. Anna Fariyanti, M.Si
- Dr. Ir. Netti Tinaprilla, M.M
- Dr. Ir. Burhanuddin, M.M
- Maryono, S.P, M.Si

Desain Sampul :

- Hamid Jamaludin Muhrim, SE

Tata Letak Isi :

- Hamid Jamaludin Muhrim, S.E
- Triana Gita Dewi, S.E, M.Si
- Tursina Andita Putri, S.E, M.Si

Administrasi Umum :

- Tita Nursiah, S.E
- Tursina Andita Putri, S.E, M.Si

Diterbitkan oleh **Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen - IPB**
Bekerjasama dengan **Asosiasi Agribisnis Indonesia (AAI)**
Copyright © 2015

Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen - IPB

Jl. Kamper Wing 4 Level 5 Kampus IPB Dramaga Bogor 16680

Telp/Fax : 0251-8629654

e-mail : depagribisnis@yahoo.com, dep-agribisnis@apps.ipb.ac.id

Website : <http://agribisnis.ipb.ac.id>

ISBN : 978-602-14623-3-1

KATA PENGANTAR

Seminar Nasional Agribisnis diselenggarakan dalam rangka Tujuh Puluh Tahun Prof. Bungaran Saragih yang diselenggarakan pada Sabtu 18 April 2015 dengan tema “*Kristalisasi Paradigma Agribisnis dalam Pembangunan dan Pendidikan Tinggi*”. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB bekerjasama dengan Asosiasi Agribisnis Indonesia (AAI), Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), Pusat Pangan Agribisnis (PPA), PROFITA Unggul Konsultama, *Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute* (PASPI) serta AGRINA.

Prof. Bungaran Saragih pada awal tahun 90-an memperkenalkan istilah Agribisnis yang merupakan cara baru dalam melihat pertanian. Hal ini berarti pertanian bukan hanya pada kegiatan usahatani (*on farm activities*) tetapi juga kegiatan di luar usahatani (*off farm activities*). Dengan kata lain, pertanian tidak hanya berorientasi produksi (*production oriented*) tetapi juga berorientasi pasar (*market oriented*), tidak hanya dilihat dari sisi permintaan (*demand side*) tetapi juga dari sisi penawaran (*supply side*).

Prosiding ini merupakan kompilasi artikel-artikel yang dipresentasikan dalam Seminar Nasional Agribisnis tersebut. Latar belakang bidang keilmuan serta daerah penulis yang beragam menghasilkan berbagai perspektif dalam pembangunan agribisnis di Indonesia. Artikel dalam prosiding ini penuh dengan gagasan dan ide-ide baru yang melihat pertanian dalam arti luas yang dikelompokkan ke dalam subtema: Sistem Agribisnis, Pengadaan Input, Usahatani, Pengolahan, Pemasaran, dan Penunjang. Artikel-artikel dalam prosiding ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan di bidang agribisnis serta dapat pula dijadikan rekomendasi kebijakan bagi pengambil keputusan.

Pada kesempatan kali ini, ijinilah kami untuk mengucapkan terima kasih kepada Dr Rachmat Pambudy, MS; Dr Nunung Kusnadi, MS; Dr Andriyono K Adhi; Dr Suharno, MADev; Dr Anna Fariyanti, MS; Dr Burhanuddin, MM; Dr Netti Tinaprila, MM; Dr Amzul Rifin, MA; Siti Jahroh, PhD, serta Etriya, MM yang telah bekerja keras untuk menilai artikel yang dipresentasikan sehingga layak untuk ditampilkan dalam prosiding ini. Penghargaan juga disampaikan kepada Hamid Jamaludin M, Tursina Andita Putri, Triana Gita Dewi, dan Tita Nursiah yang telah membantu dalam penyusunan prosiding ini. Semoga prosiding ini dapat berkontribusi dalam pengembangan agribisnis dan peningkatan kesejahteraan petani.

Terimakasih

Bogor, September 2015
Ketua Departemen Agribisnis FEM IPB

Dr. Ir. Dwi Rachmina, M.Si

DAFTAR ISI

Sistem Agribisnis

Model Pengembangan Agribisnis Kelapa Terpadu di Kabupaten Indragiri Hilir <i>Djaimi Bakce, dan Syaiful Hadi</i>	1
Perubahan Sistem Agribisnis Petani Hortikultura dalam Menghadapi Era Pasar Modern (Studi Kasus Petani Hortikultura di Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung) <i>Gema Wibawa Mukti, Dini Rochdiani, dan Rani Andriani Budi Kusumo</i>	23
Sistem Insentif untuk Mendukung Daya Saing Agribisnis Kopi Rakyat di Jawa Timur <i>Luh Putu Suciati, dan Rokhani</i>	41

Pengadaan Input

Peran Industri Benih Jagung dalam Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Kasus di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah) <i>Kurnia Suci Indraningsih</i>	57
Analisis Aksesibilitas Petani Perkotaan terhadap Agroinput dan Implikasinya terhadap Pengembangan <i>Urban Farming</i> <i>Harniati, dan Reni Suryanti</i>	73
Kajian Karakteristik Produsen dan Penangkar Benih Padi di Daerah Istimewa Yogyakarta <i>Wahyuning K. Sejati, dan M. Suryadi</i>	83
Sistem “Jabalsim” Sebagai Solusi untuk Penyediaan Benih Kedelai (Kasus di Kabupaten Wonogiri) <i>Tri Bastuti Purwantini</i>	97
Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pupuk Bersubsidi sebagai <i>Supporting System Agribusiness</i> terhadap Agribisnis Perberasan <i>Surya Abadi Sembiring</i>	109

Usahatani

Pemahaman dan Partisipasi Petani dalam Adopsi Teknologi Biochar di Lahan Kering Blitar Selatan <i>Asnah, Masyhuri, Jangkung Handoyo Mulyo, dan Slamet Hartono</i>	127
Diterminan Pengelolaan Satuan Usaha Perhutanan Kerakyatan (SUPK) di Kawasan Perhutanan Kerakyatan-Tanggamus, Lampung <i>Ismalia Afriani, F. Sjarkowi, Najib Asmani, dan M Yazid</i>	135

Emisi Gas Rumah Kaca Aktivitas <i>On-Farm</i> Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Timur: Studi Empiris <i>The Environmental Kuznets Curve</i> <i>Gilang Wirakusuma, Irham, dan Slamet Hartono</i>	151
Ketahanan Pangan di Sumatera Selatan Ditinjau dari Tren Produksi Beras dan Stok Beras Pedagang <i>Desi Aryani</i>	167
Produksi dan Pendapatan Petani Kelapa Dalam (<i>Cocos Nucifera</i> Linn) di Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau <i>Sisca Vaulina, dan Saiful Bahri</i>	183
Keunggulan Kompetitif Kedelai: Pendekatan Policy Analysis Matrix (PAM) (Kasus di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur) <i>Syahrul Ganda Sukmaya, dan Dwi Rachmina</i>	199
Percepatan Adopsi Tanaman Manggis melalui Sekolah Lapang di Kecamatan Mandalawangi Provinsi Banten <i>Asih Mulyaningsih, Imas Rohmawati, dan Suherna</i>	207
Dampak Program Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu Terhadap Efisiensi Teknis Usahatani Kedelai di Kabupaten Jember <i>Indah Ibanah, Andriyono Kilat Adhi, dan Dwi Rachmina</i>	219
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produksi Lobster Laut <i>Sitti Aida Adha Taridala , Asriya, dan Yusnaini</i>	233
Prospek Pengembangan Usahatani Bawang Merah Lokal Palu di Tinjau dari Tingkat Pendapatan di Desa Boluponto Jaya Kecamatan Sigi Kabupaten Sigi <i>Lien Damayanti, Yulianti Kalaba, dan Erny</i>	245
Analisis Kesiapan dan Strategi Pengembangan Bisnis Koperasi Produsen Kopi “Margamulya” (Studi Kasus Koperasi Produsen Kopi Margamulya Pangalengan Kabupaten Bandung) <i>Ima Marlina, dan Endah Djuwendah</i>	257
Dampak Ekonomi Karakteristik Peternak terhadap Pola Usaha Kemitraan Ayam Broiler di Daerah Jember, Situbondo, Bondowoso Lumajang dan Banyuwangi <i>Hariadi Subagja, dan Wahjoe Widhijanto Basuki</i>	267
Dampak Konsentrasi Industri terhadap Performans di Industri Broiler Indonesia <i>Anna Fitriani, Heny K. Daryanto, Rita Nuralina, dan Sri Hery Susilowati</i>	279
Perilaku Ekonomi Rumahtangga Petani Kelapa Sawit di Desa Indra Sakti Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar <i>Elinur, dan Asrol</i>	297
Introduksi Potensi Integrasi Sapi-Sawit dalam Mendukung Akselerasi Peningkatan Produksi Daging Sapi Nasional <i>Priyono</i>	311
Perilaku Harga Bawang Putih Jawa Timur dan Cina <i>Herdinastiti</i>	325

Performansi Pembagian Kerja antara Laki-Laki dan Perempuan pada Usahatani Kentang <i>Ana Arifatus S, dan Dyanasari</i>	339
--	-----

Pengolahan

Potensi Sumberdaya Pertanian Lokal dalam Pemenuhan Kebutuhan Bahan Pangan Sumber Karbohidrat di Provinsi Bengkulu <i>Putri Suci Asriani, dan Bonodikun</i>	357
Perbandingan Analisis Nilai Tambah Kopi Arabika dengan Metode Proses Pengolahan Kering dan Basah (Studi Kasus pada Malabar Mountain Coffee PT. Sinar Mayang Lestari, Kabupaten Bandung) <i>Resty Tyagita Aprilia, dan Tuti Karyani</i>	371
Analisis Penerapan Manajemen Mutu Susu Pasteurisasi (Studi Kasus Unit Susu Pasteurisasi Pondok Modern Darul Ma'rifat Gontor 3 Desa Sumbercangkkring Kecamatan Guruh Kabupaten Kediri) <i>Akhadiyah Afrila, dan Asnah</i>	385
Studi Komparasi Nilai Tambah Produk Olahan Kentang Granola di Wilayah Pangalengan (Jawa Barat) dengan Banjarnegara (Jawa Tengah) <i>Vela Rostwentiavi Sinaga, dan Doni Sahat Tua Manalu</i>	397
Pengembangan Agroindustri Teh Rakyat dengan Pendekatan <i>Soft System Methodology</i> (Studi Kasus di Kabupaten Bandung) <i>Sulistiyodewi NW</i>	409
Karakteristik Pengusahaan Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat <i>Tursina Andita Putri</i>	421

Pemasaran

Pengaruh Konsep Produk, Budaya Konsumsi, Keluarga terhadap Perilaku Konsumen Mengonsumsi Produk Kebab (Studi Kasus: Kebab Turki XXX) <i>Adhi Tejo Dwicahyo, Nunuk Adiarni, dan Mudatsir Najamuddin</i>	441
<i>The Demand and Competition Among Supply Source in Indonesia Meat Import Market</i> <i>Resti Prastika Destiarni, Ahmad Syariful Jamil, dan Netti Tinaprilla</i>	455
Kinerja Rantai Pasok Komoditas Bawang Daun (<i>Allium fistulosum L.</i>) di Koperasi untuk Memenuhi Permintaan Pasar Terstruktur (Studi Kasus di Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq, Desa Alam Endah, Kecamatan Rancabali, Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat) <i>Nurul Risti Mutiarasari, Eddy Renaldi, dan Ery Supriyadi Rustidja</i>	469
Analisis Determinan Permintaan Kopi Arabika di Provinsi Sumatera Utara <i>Rahmanta</i>	489

Analisis Permintaan dan Penawaran Tembakau Besuki Na Oogst di Kabupaten Jember Jawa Timur <i>Novi Haryati, Soetrisno, dan Anik Suwandari</i>	503
Analisis Permintaan Impor Garam Indonesia dengan Pendekatan <i>Almost Ideal Demand System</i> <i>Ahmad Syariful Jamil, Netti Tinaprilla, dan Suharno</i>	517
Analisis Tataniaga Pisang sebagai Daya Ungkit Revitalisasi Pengembangan Produksi Hortikultura di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah <i>Endang Siti Rahayu, dan Joko Sutrisno</i>	531
Sistem Pemasaran Karet dengan Pendekatan <i>Food Supply Chain Network (FSCN)</i> di Kabupaten Tebo, Jambi <i>Rikky Herdiyansyah, Rita Nurmalina, dan Ratna Winandi A</i>	545

Penunjang

Potensi Pengembangan Agrowisata dan Konservasi Ex-Situ Tumbuhan Kantong Semar (<i>Nepenthes sp.</i>) di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau <i>Ryan Budi Setiawan, dan Eksa Rusdiyana</i>	565
Analisis Perbedaan Pendapatan Petani Budidaya Ikan Patin Penerima dan Non Penerima Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi “PUKK” PT Perkebunan Nusantara V <i>Rika Amelia Jas, Amzul Rifin, dan Netti Tinaprilla</i>	575
Efektivitas Perilaku Komunikasi di Dalam Sekolah Lapang – Pengelolaan Tanaman Terpadu di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor <i>Ali Alamsyah Kusumadinata</i>	585
Karakteristik Perempuan Wirausaha di Lingkar Kampus Institut Pertanian Bogor, Kecamatan Darmaga, Kabupaten Bogor <i>Iqbal Reza Fazlurrahman, Anna Fariyanti, dan Suharno</i>	603
Biaya Transaksi pada Pembiayaan Usahatani Kedelai di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur <i>Hardiyanti Sultan, Dwi Rachmina, dan Anna Fariyanti</i>	615
Proses Penumbuhan dan Efektivitas Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) (Kasus di LKMA Sejahtera, Kabupaten Lamongan) <i>Ratih Apri Utami, Lukman M. Baga, dan Suharno</i>	631
Faktor atas Pengambilan Keputusan Mahasiswa dalam Memilih Program Studi Agribisnis <i>Anita Primaswari Widhiyani, dan Triana Gita Dewi</i>	647

PROSES PENUMBUHAN DAN EFEKTIVITAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS (LKMA) (KASUS DI LKMA SEJAHTERA, KABUPATEN LAMONGAN)

Ratih Apri Utami¹⁾, Lukman M. Baga²⁾, dan Suharno²⁾

¹⁾Mahasiswa Pascasarjana Magister Sains Agribisnis, FEM, Institut Pertanian Bogor

²⁾Staf Pengajar Departemen Agribisnis, FEM, Institut Pertanian Bogor

E-mail : ¹⁾ratihapri17@gmail.com

ABSTRACT

Institutional innovation through farmer groups require capital facilities that can be accessed by farmers with ease. In 2008, the Ministry of Agriculture implement PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan). Gapoktan a farmer institutional PUAP program implementers who serves as manager of venture capital assistance to farmer members, in the hope that the fund can grow, so that the capital requirements for farming can be met on an ongoing basis. Gapoktan PUAP grant recipients are expected to manage these funds through autonomous business units or savings and loan to Agribusiness Microfinance Financial Institutions (LKMA). The purpose of this study is to analyze the process of growth and effectiveness LKMA in Lamongan. Research shows that growth in Gapoktan PUAP LKMA categorized as "good" at this stage of preparation. While the stages of implementation and preparation LKMA development, the result is "less good". While the results of the analysis showed that the effectiveness of the LKMA. LKMA of Gapoktan Sejahtera in Lamongan a sample of performance effectiveness of "good". It can be seen from the four parameters namely organizational aspects of fund distribution PUAP aspects, aspects of the utilization of funds PUAP, and aspects of the refund PUAP which reaches an average value 4. Suggestions research (1) increase the role of Penyelia Mitra Tani (PMT) in assistance, (2) develop an autonomous unit LKMA not only as a lending institution, but also savings, (3) develop a process of growing the business through the entrepreneurial spirit LKMA's member for sustainability.

Keyword(s): LKMA, Gapoktan, PUAP, Growth, Effectiveness

ABSTRAK

Inovasi kelembagaan melalui kelompok tani memerlukan fasilitas permodalan yang bisa diakses oleh petani dengan mudah. Pada tahun 2008, Kementerian Pertanian melaksanakan Program PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan). Gapoktan merupakan kelembagaan tani pelaksana program PUAP yang berfungsi sebagai pengelola bantuan modal usaha bagi petani anggota, dengan harapan dana tersebut dapat tumbuh dan berkembang, sehingga kebutuhan modal bagi usahatani dapat terpenuhi secara berkesinambungan. Gapoktan penerima dana PUAP diharapkan dapat mengelola dana tersebut melalui unit usaha otonom simpan pinjam atau Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses penumbuhan LKMA dan efektivitas LKMA di Kabupaten Lamongan. Penelitian menunjukkan bahwa penumbuhan LKMA pada Gapoktan PUAP dikategorikan "baik" pada tahapan persiapan. Sedangkan pada tahapan pelaksanaan dan persiapan pengembangan LKMA, hasilnya dikategorikan "kurang baik". Sedangkan hasil analisis efektivitas LKMA menunjukkan bahwa efektivitas LKMA Gapoktan Sejahtera di Kabupaten Lamongan yang menjadi sampel penelitian memiliki kinerja efektivitas "baik". Hal itu dapat dilihat dari 4 parameter yaitu aspek organisasi, aspek penyaluran dana PUAP, aspek pemanfaatan dana PUAP, dan aspek

pengembalian dana PUAP yang mencapai nilai rata-rata 4. Saran penelitian (1) meningkatkan peran Penyelia Mitra Tani (PMT) dalam pendampingan, (2) mengembangkan unit otonom LKMA tidak hanya sebagai lembaga peminjaman, tapi juga tabungan, (3) mengembangkan proses penumbuhan bisnis melalui jiwa kewirausahaan anggota untuk keberlanjutan LKMA.

Kata Kunci: LKMA, Gapoktan, PUAP, Penumbuhan, Efektivitas

PENDAHULUAN

Sektor pertanian dan agribisnis di pedesaan merupakan sumber pertumbuhan perekonomian nasional. Perubahan paradigma pembangunan pertanian Indonesia, dari peningkatan produksi menjadi pendekatan agribisnis, membutuhkan petani dengan posisi tawar yang kuat. Hal ini hanya dapat dicapai jika petani mampu berhimpun dalam suatu kekuatan bersama, seperti halnya kelompok tani. Kelompok tani merupakan sarana untuk menggali potensi sumberdaya manusia.

Percepatan adopsi inovasi kelembagaan melalui kelompok tani memerlukan fasilitas permodalan yang bisa diakses oleh petani dengan mudah. Belajar dari pengalaman kredit program/bantuan modal dari pemerintah, ternyata bahwa sebagian besar program tidak dapat berkelanjutan pelaksanaannya di tingkat lapang. Setelah program selesai, petani tidak lantas menjadi mandiri dan sejahtera. Salah satu penyebabnya adalah karena dana bantuan program pemerintah tidak dapat dikelola dengan baik oleh petani.

Pada tahun 2008 pemerintah melaksanakan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang bertujuan untuk mengatasi permodalan petani menjalankan agribisnis, petani difasilitasi dengan cara Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar 100 juta

rupiah melalui Gapoktan. Program dana hibah dari pemerintah ini mempunyai jangka waktu, artinya terdapat batasan untuk melaksanakan program PUAP ini, sehingga petani tidak dapat terus bergantung pada dana PUAP, karena dana PUAP hanya bertujuan sebagai stimulus agar petani mampu membangun suatu lembaga keuangan. Gapoktan penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUAP diarahkan untuk dapat dibina dan ditumbuhkan menjadi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) sebagai salah satu unit usaha dalam Gapoktan demi keberlanjutan pembiayaan untuk petani.

Pertumbuhan LKMA di pedesaan diharapkan menjadi solusi terhadap permasalahan alternatif akses permodalan yang berkelanjutan untuk petani. Penyaluran dana PUAP melalui LKMA diiringi oleh sistem kepengurusan dan penyusunan program yang baik akan mempengaruhi keberlanjutan LKMA tersebut sebagai alternatif permodalan agribisnis pedesaan. Pemberdayaan dan pembinaan kepada Gapoktan penerima dana PUAP untuk mengembangkan LKMA sebagai salah satu unit usahanya dimaksudkan agar aset dana PUAP dan dana keswadayaan yang dikumpulkan oleh Gapoktan dapat dikelola dengan baik dan profesional. LKMA diharapkan dapat memberikan pelayanan keuangan mikro

sesuai dengan yang dibutuhkan petani miskin dan pengusaha mikro pertanian di perdesaan secara berkelanjutan.

Parameter keberhasilan kinerja LKMA diukur dari kemampuan lembaga tersebut dalam menyalurkan dan mengelola dana PUAP secara efektif dan mengembangkannya sehingga terjadi akumulasi dana PUAP dari waktu ke waktu. Efektivitas pengelolaan dan penyaluran dana PUAP salah satunya ditentukan oleh kemampuan LKMA menjangkau sebanyak mungkin petani yang benar-benar memerlukan bantuan penguatan modal untuk kegiatan usahanya. Mengingat berkembangnya jangkauan model LKM, perhatian sekarang ini berpusat pada keberlanjutan program. Keberlanjutan dan penjangkauan adalah masalah yang banyak dibahas dalam bidang keuangan mikro yaitu dalam hubungan jangkauan peserta dan keberlanjutan lembaga (Morduch, 2000).

Kabupaten Lamongan adalah salah satu kabupaten di propinsi Jawa Timur yang mendapatkan program PUAP sejak awal program berjalan tahun 2008. Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan tahun 2013, LKMA berprestasi yang telah mengelola dana PUAP adalah LKMA Sejahtera yang berada di Kecamatan Kembangbahu. LKMA ini memiliki fungsi untuk mengelola dana PUAP yang diterima oleh Gapoktan Sejahtera pada tahun 2011 sebesar Rp 100.000.000,-. Keberadaan LKMA Sejahtera adalah salah satu upaya untuk mewujudkan alternatif solusi per-modalanan bagi para petani dalam mengembangkan usaha agribisnis pe-desaan yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa pertanyaan penelitian mengenai penyaluran dana PUAP gapoktan melalui LKMA Sejahtera Kabupaten Lamongan adalah:

1. Bagaimana proses penumbuhan LKMA Sejahtera Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana efektivitas LKMA sebagai alternatif pembiayaan agribisnis perdesaan Kabupaten Lamongan.

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis proses penumbuhan LKMA Kabupaten Lamongan.
2. Menganalisis efektivitas LKMA sebagai alternatif pembiayaan agribisnis perdesaan Kabupaten Lamongan.

KERANGKA PEMIKIRAN Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Kredit berperan penting dalam pembiayaan pembangunan, dalam konteks yang lebih luas juga dikemukakan bahwa dengan akses kredit, maka seseorang akan dapat mengoptimalkan usahanya untuk mencapai tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Salah satu permasalahan klasik yang dihadapi sektor pertanian di pedesaan adalah masalah akses kredit permodalan. Anwar (1995) menyatakan di dalam pasar kredit pedesaan dalam kenyataannya terjadi segmentasi pasar. Terjadinya segmentasi pasar ini, khususnya pasar kredit bagi masyarakat golongan ekonomi lemah sangat kentara sekali. Hal ini terjadi karena ada penghalang kelembagaan (*institutional barrier*) bagi rumah tangga miskin dan golongan ekonomi lemah untuk akses pada lembaga keuangan formal.

Seibel (1998) mendefinisikan LKM sebagai lembaga keuangan formal dan non-formal yang menyediakan layanan simpanan mikro, kredit mikro, investasi mikro, dan asuransi mikro untuk mengembangkan layanan usaha ekonomi mikro. Dalam arti sempit, LKM adalah lembaga keuangan skala kecil dan lokal. Dalam arti yang lebih luas, LKM dapat merupakan lembaga keuangan mikro skala regional dan nasional untuk memfasilitasi layanan keuangan mikro para penabung dan peminjam kecil.

Berenbach dalam Churchill (1997) mengemukakan keberhasilan LKM Indonesia karena dalam hal skala, jenis, jumlah, penetrasi pasar, dan profitabilitas, LKM di Indonesia adalah yang paling maju di dunia. Pada waktu itu, Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara di dunia yang memiliki jaringan LKM meluas hingga ketinggian desa. Lebih dari 15 ribu bank unit desa menyediakan tabungan dan kredit kepada hampir 17 juta nasabah.

Berdasarkan Boysen dan Sahlberg (2008), salah satu contoh LKM yang berhasil mengentaskan kemiskinan adalah *Grammen Bank* yang didirikan oleh Muhammad Yunus di Bangladesh. Kunci keberhasilan Grammen Bank terletak pada strategi yang mumpuni dalam membangun hubungan yang harmonis antara bank dan peminjam (*The bank-borrower relationship*). Hubungan yang harmonis antara bank dan peminjam dengan memadukan strategi LKM yang memasukkan unsur struktur dan budaya setempat. Struktur organisasi dibuat sangat efisien dan efektif, sehingga semua kebijakan yang diarahkan oleh

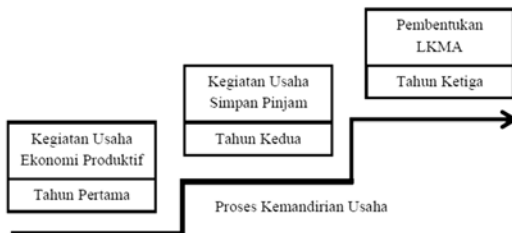
manajemen *Grammen Bank* dapat diaplikasikan secara baik di tingkat lokal. Salah satu upaya pengamanan dalam pembiayaan, pihak Grammen Bank menerapkan salah satu instrumen, yaitu aturan tanggung renteng di dalam kelompok.

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

PUAP merupakan program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Gapoktan di perdesaan dengan memberikan fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani pemilik, petani penggarap, buruh tani, dan rumah tangga tani yang salah satu tujuannya untuk memberikan kepastian akses pembiayaan kepada petani anggota Gapoktan. Struktur PUAP terdiri dari Gapoktan, Penyuluh Pendamping, dan Penyelia Mitra Tani (PMT) sebagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pemberdayaan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan melalui pengembangan kegiatan usaha agribisnis. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) penerima dana PUAP sebagai kelembagaan usahatani pelaksana PUAP (Kementerian Pertanian 2013).

Sesuai dengan mekanisme pelaksanaan program PUAP, pada tahun pertama dana PUAP dimanfaatkan oleh Gapoktan untuk membiayai usaha produktif sesuai dengan usulan anggota secara berjenjang melalui Rencana Usaha Anggota (RUA), Rencana Usaha Kelompok (RUK), dan Rencana Usaha Bersama (RUB). Dana penguatan modal usaha PUAP digulirkan Gapoktan kepada para anggota kelompok tani sebagai pinjaman, sehingga pada tahun kedua Gapoktan

sudah dapat mengembangkan Usaha Simpan Pinjam (U-S/P). Gapoktan penerima dana PUAP diharapkan dapat menjaga perguliran dana sampai pada fase pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) pada tahun ketiga. LKMA yang berhasil ditumbuhkembangkan oleh Gapoktan diharapkan dapat meningkatkan akumulasi modal melalui dana keswadayaan yang dikumpulkan oleh anggota melalui tabungan maupun melalui saham anggota (Pedoman Penumbuhan LKMA Gapoktan PUAP, 2012). Tahapan Proses Pembinaan Kelembagaan PUAP disajikan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Proses Pembinaan Kelembagaan PUAP

Sejalan dengan format penumbuhan kelembagaan tani diperdesaan, Menteri Pertanian melalui Permentan Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 telah menetapkan Gapoktan merupakan format final dari organisasi ditingkat petani diperdesaan yang didalamnya terkandung fungsi-fungsi pengelolaan, antara lain unit pengolahan dan pemasaran hasil, unit peyediaan saprodi, dan unit kelembagaan keuangan mikro. Gapoktan penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUAP, diarahkan untuk dapat dibina dan ditumbuhkan menjadi Lembaga Keuang-

an Mikro Agribisnis (LKMA) sebagai salah satu unit usaha dalam Gapoktan. Kebijakan pengembangan Gapoktan PUAP menjadi LKMA merupakan langkah strategis (Pedoman Pengembangan LKMA GAPOKTAN PUAP 2014).

LKMA merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengelola dana PUAP. PUAP merupakan bantuan Pemerintah Pusat kepada petani yang tergabung dalam Gapoktan yang bersifat sebagai dana bergulir (*revolving fund*). Hal ini berarti dana PUAP yang diberikan kepada Gapoktan adalah sebagai modal kerja untuk menjalankan dan meningkatkan kegiatan usaha ekonomi produktif dan bukan dana bantuan yang diberikan kepada petani tanpa disertai dengan kewajiban untuk mengembalikannya (bantuan cuma-cuma). Dengan demikian, petani pemanfaat dana PUAP memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut kepada LKMA untuk digulirkan kembali kepada petani lain di dalam Gapoktan yang bersangkutan. Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) yang merupakan produk Kementerian Pertanian, tugas pengawasannya dilakukan oleh Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani (PMT) yang merupakan Tenaga Harian Lepas (THL) Kementerian Pertanian.

Proses Penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA)

Sebuah lembaga keuangan yang cocok bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi lemah menurut Yunus (2008), pendiri Grameen Bank, sebaiknya memiliki asas kepercayaan. Dengan memberikan kepercayaan kepada masyarakat,

maka mereka akan memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan. Mayoritas masyarakat yang meminjam pada lembaga keuangan mikro adalah wanita. Hal ini dikarenakan mereka cenderung lebih jujur dan lebih visioner dalam melakukan sesuatu hal.

Salah satu masalah yang dihadapi petani di Indonesia adalah lemahnya organisasi petani yang berada di perdesaan. Salah satu organisasi yang berkembang di perdesaan dan memiliki aktivitas simpan pinjam yang serupa dengan lembaga keuangan mikro adalah koperasi. Begitu pula tujuan penumbuhan LKMA diharapkan sejalan dengan prinsip koperasi.

LKMA sebagai badan usaha harus memiliki mekanisme yang sederhana sehingga mudah dipahami serta dapat mengakomodasi aktivitas petani setempat. Partisipasi yang menyeluruh dalam arti pengelolaannya melibatkan multi "stakeholder" melalui pertemuan kelompok sejak tahap perumusan kebijakan Keterbukaan informasi, sehingga petani/kelompok tani dapat mengetahui dan memberikan kontribusi bahkan melakukan Kompensasi Pengelolaan program dan dana harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*).

Tujuan umum pembentukan LKMA adalah untuk membantu memfasilitasi kebutuhan modal usahatani bagi petani. Secara khusus pembentukan LKMA bertujuan untuk (Hendayana *et al* 2009) :

1. Meningkatkan kemudahan akses petani terhadap skim pembiayaan yang disediakan pemerintah atau pihak lainnya;

2. Meningkatkan produktivitas dan produksi usahatani/usaha ternak dalam rangka mendorong tercapainya nilai tambah usahatani;
3. Mendorong pengembangan ekonomi perdesaan dan lembaga ekonomi perdesaan, utamanya Gapoktan.

Berdasarkan Pedoman Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) Gapoktan PUAP (2014), penumbuhan LKMA oleh Gapoktan penerima dana BLM PUAP, dilakukan melalui proses dan tahapan-tahapan antara lain (1) Identifikasi awal Gapoktan; (2) Validasi profil; (3) Tahap Transformasi Unit Usaha Keuangan Mikro atau Simpan Pinjam Gapoktan Menjadi LKMA; (4) Implementasi, dan penumbuhan; (5) Fasilitasi Penumbuhan dan Pengembangan LKMA.

Efektivitas LKMA

Parameter keberhasilan kinerja Gapoktan dapat diukur dari kemampuan lembaga tersebut dalam menyalurkan dan mengelola dana PUAP secara efektif. Efektivitas pengelolaan dan penyaluran dana PUAP melalui LKMA ditentukan oleh kemampuannya menjangkau sebanyak mungkin petani dalam hal ini anggota kelompok tani yang benar-benar memerlukan bantuan penguatan modal untuk kegiatan usahanya. Penilaian keefektifan ini dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda yaitu dari sisi penilaian kinerja LKMA dalam menyalurkan dana PUAP kepada anggotanya dan dari sisi persepsi anggota atau yang menerima dana bantuan PUAP.

Penilaian kinerja efektivitas LKMA dalam mengelola dana PUAP dilakukan

dengan cara mengidentifikasi indikator keberhasilan program PUAP berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/OT.140/1/2013 Tentang Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan. Indikator keberhasilan program PUAP adalah:

1. Indikator output, yaitu:
 - a. Tersalurkannya dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUAP kepada petani, buruh tani dan rumah tangga tani dalam melakukan usaha produktif sektor pertanian.
 - b. Terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kemampuan sumberdaya manusia pengelola Gapoktan, Penyuluh Pendamping, dan Penyelia Mitra Tani (PMT).
2. Indikator *outcome*, yaitu:
 - a. Meningkatkan kemampuan Gapoktan dalam memfasilitasi dan mengelola bantuan modal usaha untuk petani anggota baik pemilik, petani penggarap, buruh tani, maupun rumah tangga tani.
 - b. Meningkatnya jumlah petani, buruh tani, dan rumah tangga tani yang mendapatkan bantuan modal usaha tani.
 - c. Meningkatnya aktivitas kegiatan agribisnis di sektor hulu, sektor budidaya, dan sektor hilir di perdesaan.
 - d. Meningkatnya pendapatan petani (pemilik dan atau penggarap), buruh tani, dan rumah tangga tani, dalam berusaha tani sesuai dengan potensi wilayah.
3. Indikator *benefit* dan *impact*, yaitu:

- a. Berkembangnya usaha agribisnis dan usaha ekonomi rumah tangga tani di lokasi desa penerima dana PUAP.
- b. Berfungsinya Gapoktan sebagai lembaga ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh petani.
- c. Berkurangnya jumlah petani miskin dan pengangguran di perdesaan.

Selain indikator di atas, Gapoktan yang ditumbuhkan menjadi LKMA adalah Gapoktan Utama, sedangkan aspek penilaian yang menjadi ukuran kinerja Gapoktan untuk ditumbuhkan menjadi LKMA adalah (Direktorat Pembiayaan Pertanian, 2011)

1. Modal keswadayaan, yaitu modal dari anggota yang berhasil dikumpulkan oleh Gapoktan dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan khusus. Modal keswadayaan merupakan alat ukur utama dalam menentukan kemandirian Gapoktan.
2. Simpanan sukarela, yaitu simpanan anggota yang mencerminkan bentuk kepercayaan sekaligus partisipasi anggota kepada Gapoktan.
3. Aset yang dikelola, yaitu kekayaan Gapoktan yang berasal dari dana keswadayaan (simpanan anggota), saham, dan dana penyertaan pemerintah yang dikelola untuk kepentingan anggota.
4. Kumulatif penyaluran, yaitu besarnya dana yang disalurkan sesuai dengan usulan anggota dan mencerminkan gambaran ketaatan pengurus Gapoktan dalam menjalankan aturan organisasi. Dalam sistem perbankan,

kumulatif penyaluran disebut dengan LDR (*Loan to Deposit Ratio*).

5. Tingkat pembiayaan bermasalah, yaitu pembiayaan usaha tani oleh Gapoktan yang mengalami masalah dalam pengembalian. Pembiayaan yang bermasalah sangat tergantung pada; (a) analisis usaha anggota sebelum pembiayaan diberikan; (b) anggota tidak dapat membayar pinjaman akibat puso; (c) anggota tidak mau membayar karena niat yang kurang baik dari anggota yang bersangkutan.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Pemilihan lokasi pengambilan data dilakukan secara *purposive*. Daerah yang dipilih sebagai tempat pengambilan data mengenai kinerja keberlanjutan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) yang dilakukan di LKMA Sejahtera, Desa Puter, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan. Pemilihan tempat penelitian tersebut karena LKMA tersebut memiliki dana aset yang besar dan merupakan rekomendasi dari pihak Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan sebagai LKMA yang berprestasi. Pengambilan data penelitian dilakukan pada bulan Februari-Maret 2015.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil pengisian kuesioner dan wawancara langsung dengan responden yaitu pejabat Dinas Pertanian dan Kehutanan, Penyelia

Mitra Tani (PMT), Penyuluh Lapang, pengurus dan nasabah petani anggota LKMA. Data sekunder diperoleh dari Direktorat Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan, Unit Pelaksana Teknis Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan, selain itu data sekunder juga diperoleh dari penelusuran kepustakaan, internet dan literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Metode Pengambilan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data primer dilakukan melalui kuesioner yang berisikan daftar-daftar pertanyaan yang relevan dengan tujuan penelitian. Sumber informasi utama yaitu pejabat Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan, pihak manajemen atau pengurus LKMA, Penyelia Mitra Tani (PMT) dan anggota LKMA Sejahtera. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan data hasil monitoring pertumbuhan LKMA terhadap pelaksanaan PUAP 2010 sampai 2014 yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lamongan. Data ini diperlukan untuk melihat apakah selama 4 tahun pelaksanaan PUAP oleh Gapoktan berjalan sesuai ketentuan atau tidak. Data ini juga sekaligus untuk melihat kinerja Gapoktan dalam pengembangan program PUAP melalui LKMA.

Metode Penentuan Sampel

Pengambilan sampel LKMA Sejahtera dalam penelitian ini adalah dengan hasil survei dan rekomendasi dari pihak Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabu-

paten Lamongan. Penentuan responden untuk petani padi dan palawija LKMA Sejahtera didasarkan pada petani yang tergabung (nasabah) dalam anggota LKMA ini. Berdasarkan data anggota Kelompok Tani yang menjadi anggota LKMA Gapoktan Sejahtera, didapat jumlah reponden petani berjumlah 150 orang. Metode penentuan responden dilakukan dengan metode penarikan contoh acak (*Random Sampling*) terhadap nasabah LKMA dengan penentuan jumlah contoh menggunakan rumus *Slovin* (Umar 2007) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + (Ne^2)}$$

Keterangan:

N= jumlah populasi

n = jumlah contoh minimal

e = derajat kesalahan (10%).

Persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang ditolerir atau diinginkan. Dalam penelitian ini persen kelonggaran yang diambil sebesar 10 persen.

Berdasarkan rumus *Slovin* di atas, dari total nasabah LKMA sebanyak 150 orang, maka jumlah contoh (n) atau jumlah responden yang diambil adalah:

$$n = \frac{150}{1 + (150 \times 0,1^2)} = 60 \text{ orang}$$

Metode Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian Proses Penumbuhan dan Efektivitas LKMA Sejahtera di Kabupaten Lamongan dirancang sebagai penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pemberian bobot nilai menggunakan skala *Likert* (5 =

sangat baik, 4 = baik, 3 = cukup baik, 2 = kurang baik, dan 1 = buruk).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Proses Penumbuhan LKMA

Penumbuhan LKMA pada Gapoktan penerima dana PUAP merupakan suatu kebutuhan dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi rakyat di perdesaan. Pemberdayaan dan pembinaan kepada Gapoktan penerima dana PUAP untuk mengembangkan LKMA sebagai salah satu unit usahanya dimaksudkan untuk dapat terkolanya asset dana PUAP dan dana keswadayaan yang dikumpulkan oleh Gapoktan dalam rangka memberikan bentuk pelayanan keuangan mikro sesuai dengan yang dibutuhkan pertanian di perdesaan secara berkelanjutan. Penumbuhan LKMA pada Gapoktan penerima dana PUAP dilakukan pada tahun ke-3 terhitung sejak pertama kali Gapoktan menerima dana PUAP (Kementerian Pertanian, 2012).

Proses penumbuhan LKMA dari Gapoktan Sejahtera penerima dana PUAP tahun 2011 dilakukan dengan cara mengidentifikasi tahapan-tahapan penumbuhan LKMA sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian (2012), yaitu:

- a. Identifikasi, meliputi pengukuran aspek organisasi, tatalaksana dan pembukuan Gapoktan, serta kinerja Gapoktan sebagai embrio LKMA.
- b. Validasi, yaitu validasi profil Gapoktan melalui verifikasi dengan kunjungan ke lapangan.
- c. Seleksi, yaitu menganalisis kelayakan Gapoktan yang mempunyai potensi untuk ditumbuhkan menjadi LKMA.

Seleksi dilakukan dengan simulasi untuk melihat keinginan dan tekad anggota dan pengurus Gapoktan untuk membentuk LKMA.

- d. Transformasi, yaitu penumbuhan Gapoktan menjadi LKMA dengan cara sosialisasi tentang LKMA dan musyawarah/rapat anggota.
- e. Implementasi, yaitu operasionalisasi dan pengembangan LKMA melalui pendampingan, magang, penguatan dan peningkatan likuiditas, serta monitoring dan evaluasi.

Untuk mempermudah analisis proses penumbuhan LKMA, penulis melakukan inventarisasi terhadap variabel-variabel yang disajikan dalam tabel dengan memberikan nilai bobot menggunakan skala likert. Untuk tahapan nomor 1 dan 3, pembobotan nilai kuesioner menggunakan skala *Likert* (sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan buruk dengan bobot nilai masing-masing secara berturut-turut 5, 4, 3, 2, 1. Tahapan nomor 2 juga menggunakan skala *Likert* (sangat ringan, ringan, cukup berat, berat, sangat berat) dengan bobot nilai yang sama. Sedangkan untuk tahapan nomor 4 – 7 pembobotan nilai kuesioner menggunakan skala *Biner*, di mana nilai 1 untuk ada atau dilaksanakan, dan 0 untuk tidak/ belum ada atau tidak dilaksanakan.

Tahapan-tahapan tersebut adalah; (A) pemerinkatan Gapoktan menuju LKMA; (B) hambatan pengembangan LKMA; (C) upaya solusi terhadap hambatan pengembangan LKMA; (D) tahap persiapan pembentukan LKMA; (E) pemenuhan persyaratan administrasi kelembagaan LKMA; (F) tahap pelak-

sanaan LKMA; dan (G) tahap pengembangan usaha oleh LKMA.

Penilaian terhadap pemerinkatan Gapoktan Sejahtera menuju LKMA (A) menggunakan 13 parameter, yaitu; (1) kinerja organisasi Gapoktan; (2) kinerja organisasi calon LKMA; (3) kinerja keuangan calon LKMA; (4) penyaluran dana PUAP kepada anggota; (5) pembiayaan usahatani petani miskin; (6) pengendalian penyaluran dana PUAP; (7) pencatatan dan pembukuan; (8) kelayakan usaha anggota; (9) pembuatan laporan; (10) pembinaan usaha anggota; (11) pengawasan pembiayaan; (12) mekanisme insentif dan sanksi; dan (13) prasarana dan sarana LKMA.

Penilaian terhadap hambatan pengembangan LKMA Sejahtera (B) menggunakan 11 parameter, yaitu; (1) hambatan konseptual LKMA; (2) hambatan keterbatasan dana; (3) hambatan SDM pengelola; (4) hambatan SDM anggota; (5) hambatan prasarana dan sarana; (6) hambatan produksi; (7) hambatan pemasaran; (8) hambatan teknologi dan informasi; (9) hambatan birokrasi; (10) hambatan penyimpangan dana; dan (11) hambatan kemitraan dengan lembaga lain.

Penilaian terhadap upaya solusi dalam mengatasi hambatan pengembangan LKMA Sejahtera (C) menggunakan 8 parameter, yaitu; (1) komunikasi dan koordinasi dengan Dirjen Pembiayaan Kementan; (2) komunikasi dan koordinasi dengan dinas kabupaten; (3) komunikasi dan koordinasi dengan Penyuluh Pendamping; (4) komunikasi dan koordinasi dengan PMT; (5) melakukan pelatihan untuk pengurus LKMA; (6)

melakukan pelatihan untuk anggota; (7) melakukan kerjasama kemitraan dengan lembaga lain; dan (8) memanfaatkan media cetak/elektronik dan media sosial/internet.

Penilaian terhadap tahap persiapan pembentukan LKMA Sejahtera (D) menggunakan 4 parameter, yaitu; (1) sosialisasi tentang program PUAP; (2) melakukan pembenahan terhadap kelompok tani; (3) pembentukan unit usaha simpan pinjam; dan (4) penentuan usaha produktif yang akan dikembangkan petani.

Penilaian terhadap pemenuhan persyaratan administrasi kelembagaan LKMA Sejahtera (E) menggunakan 4 parameter, yaitu; (1) akte pendirian LKMA dari notaris; (2) Surat Izin Tempat Usaha (SITU); (3) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); dan (4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Penilaian terhadap tahap pelaksanaan LKMA Sejahtera (F) menggunakan 4 parameter, yaitu; (1) pengembangan unit usaha Gapoktan; (2) pemupukan modal

melalui tabungan anggota; (3) fasilitas pelayanan calon LKMA; dan (4) kerjasama dengan lembaga keuangan lain.

Penilaian terhadap tahap pengembangan usaha oleh calon LKMA Sejahtera menggunakan 6 parameter, yaitu; (1) memiliki usaha sarana produksi pertanian; (2) memiliki usaha Usaha Pengelolaan Jasa Alsintan (UPJA); (3) memiliki perkumpulan petani pengguna air (P3A); (4) memiliki unit pengolahan hasil pertanian; (5) memiliki unit *packaging*; dan (6) memiliki unit pemasaran.

Responden yang mengisi kuesioner pada proses penumbuhan LKMA ialah *stakeholders* yang memiliki wewenang dalam penumbuhan LKMA di Kabupaten Lamongan, Tim Pembina Kabupaten (Dinas Pertanian Kabupaten Pangeglang), Penyelia Mitra Tani (PMT) dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).

Hasil proses penumbuhan LKMA terhadap Gapoktan Sejahtera di Kabupaten Lamongan tahun PUAP 2011 sampai 2013 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil penumbuhan LKMA Gapoktan Sejahtera Kabupaten Lamongan

No	Parameter Proses Penumbuhan LKMA	Rata-Rata Nilai
1	Pemeringkatan Gapoktan menjadi LKMA (A)	3.6
2	Hambatan Pengembangan LKMA (B)	3.1
3	Upaya mengatasi hambatan (C)	3.3
4	Tahap persiapan pembentukan LKMA (D)	0.8
5	Persyaratan administrasi LKMA (E)	0.5
6	Tahap pelaksanaan LKMA (F)	0.5
7	Tahap pengembangan usaha LKMA (G)	0.4

Sumber: Data Primer, 2015(diolah)

Keterangan:

- Nomor 1 sampai 3; bobot nilai menggunakan skala *Likert* (5=sangat baik, 4=baik, 3=cukup baik, 2=kurang baik, 1=buruk).
- Nomor 4 sampai 7; bobot nilai menggunakan skala *Biner* (1=ada/dilaksanakan, 0=tidak ada/ belum dilaksanakan).

Berdasarkan data yang dikumpulkan, hasil penumbuhan LKMA terhadap Gapoktan Sejahtera penerima PUAP di Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

- a. Pada tahap pemeringkatan hingga tahap persiapan pembentukan LKMA Sejahtera, secara umum berjalan “cukup baik”. Hal itu dapat dilihat dari nilai indikator penumbuhan ke-1 sampai dengan ke-3 yang memiliki nilai rata-rata di atas 3, dan nilai indikator ke-4 yang hampir mendekati angka 1. Artinya, beberapa aktivitas yang harus dilakukan dan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Gapoktan Sejahtera untuk membentuk LKMA, dilaksanakan dengan cukup baik.
- b. Namun, ketika memasuki tahap pelaksanaan yang diwakili oleh indikator ke-5 sampai dengan ke-7, LKMA Gapoktan Sejahtera tidak mampu memenuhi persyaratan yang harus diselesaikan. Hal itu dapat dilihat dari rendahnya nilai rata-rata pemenuhan persyaratan administrasi LKMA (0.5); nilai rata-rata pelaksanaan atau operasional LKMA (0.5); dan nilai rata-rata tahap pengembangan usaha LKMA (0.4). Itu berarti, pengelola LKMA hanya memiliki semangat dan keseriusan ketika hendak pembentukan LKMA saja, tetapi ketika pada fase pelaksanaan dan pengembangan LKMA, semangat dan untuk mengembangkan LKMA menurun.

ANALISIS EFEKTIVITAS LKMA

Penilaian kinerja LKMA Gapoktan penerima dana PUAP harus berdasarkan tujuan digulirkannya program PUAP.

Dalam Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian (2014), program PUAP bertujuan untuk; (a) mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah; (b) meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus Gapoktan, Penyuluh Pendamping, dan PMT; (c) memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis; dan (d) meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.

Untuk mempermudah pelaksanaan efektivitas LKMA dalam mengelola dana PUAP, penulis melakukan identifikasi dan penyederhanaan terhadap tujuan program PUAP dan indikator keberhasilan pengelolaan dana PUAP oleh LKMA. Indikator kinerja LKMA dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu kelembagaan dan organisasi; penyaluran dana PUAP; pengembangan dana PUAP; dan pengembalian dana PUAP.

Berdasarkan data yang dikumpulkan, hasil evaluasi, secara umum, efektivitas LKMA Gapoktan Sejahtera di Kabupaten Lamongan yang menjadi sampel penelitian memiliki kinerja efektivitas “baik”. Hal itu dapat dilihat dari 4 parameter yaitu aspek organisasi, aspek penyaluran dana PUAP, aspek pemanfaatan dana PUAP, dan aspek pengembalian dana PUAP yang mencapai nilai rata-rata 4.

Tabel 2. Efektivitas LKMA Gapoktan Sejahtera Kabupaten Lamongan

No	Parameter Efektivitas LKMA	Rata-Rata Nilai
1	Aspek Organisasi (A)	4.05
2	Aspek Penyaluran dana PUAP (B)	3.95
3	Aspek Pemanfaatan dana PUAP (C)	3.63
4	Aspek Pengembalian dana PUAP (D)	3.98

Sumber: Data Primer, 2015 (diolah)

Efektivitas LKMA dalam pengelolaan dana PUAP selengkapnya disajikan pada Tabel 2.

Pembobotan nilai terhadap keempat indikator kinerja tersebut menggunakan skala *Likert* (sangat baik = 5, baik = 4, cukup baik = 3, kurang baik = 2, dan buruk = 1). Responden yang diminta mengisi kuesioner sebanyak 7 orang, yaitu PMT, ketua, sekretaris, dan bendahara Gapoktan, serta 60 orang anggota Gapoktan yang bersangkutan.

Penilaian terhadap indikator kinerja kelembagaan dan organisasi menggunakan 7 parameter, yaitu; (1) memiliki struktur organisasi, LKMA Sejahtera telah membentuk struktur yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara. (2) memiliki uraian tugas, yang telah dijabarkan dalam AD ART LKMA Sejahtera; (3) memiliki rencana usaha bersama (RUB), melalui pertemuan rutin pengurus dan anggota; (4) menyelenggarakan rapat pengurus, dilakukan oleh pengurus LKMA setiap awal musim tanam; (5) peran Penyuluh Pendamping, melalui pertemuan dan musyawarah peminjaman dan pengembalian kredit LKMA SEjahtera; (6) peran Penyelia Mitra Tani (PMT), melalui pendampingan tertib administrasi dan pembukuan LKMA; dan (7) peran pembina tingkat kabupaten dan pusat, melalui evaluasi

dan pengawasan bergilir LKMA Kabupaten Lamongan.

Penilaian terhadap indikator kinerja penyaluran dana PUAP menggunakan 6 parameter, yaitu; (1) sosialisasi program PUAP kepada anggota, dilakukan pengurus Gapoktan kepada anggota bersamaan dengan pencairan dana PUAP Gapoktan Sejahtera; (2) seleksi calon penerima dana PUAP, dilakukan melalui Ketua Kelompok Tani dengan sistem bergiliran dan sesuai kebutuhan; (3) peran pengurus Gapoktan dalam menyusun rencana usaha anggota, dilakukan melalui rapat pengurus Gapoktan yang tertuang dalam AD ART; (4) penyaluran dana PUAP sesuai rencana anggota, berdasarkan sistem tanggung renteng yang diterapkan kelompok tani; (5) kemudahan persyaratan penerimaan dana PUAP, dilakukan melalui perantara Kelompok Tani untuk disalurkan sesuai kebutuhan anggota; dan (6) memiliki unit LKMA, terbentuk setelah tahun ke-3 setelah penerimaan dan PUAP untuk kebutuhan usaha produktif dan kegiatan simpan pinjam.

Penilaian terhadap indikator kinerja pengembangan dana PUAP menggunakan 5 parameter, yaitu; (1) peningkatan jumlah anggota penerima dana PUAP, dibuktikan melalui pergiliran anggota yang membutuhkan kredit di setiap kelompok tani; (2) peningkatan unit

usahatani, masih terbentuk unit peminjaman sedangkan unit pemasaran dan pengolahan hasil pertanian belum ada; (3) peningkatan akumulasi dana PUAP, terbukti selama 3 tahun berjalan sejak 2011 sampai 2014, LKMA Sejahtera mampu meningkatkan dana sebesar 115 juta rupiah; (4) tingkat pengembalian pinjaman dana PUAP oleh anggota, telah diantisipasi melalui kelompok tani dengan sistem tanggung renteng, sehingga tingkat pengembalian mencapai 100%; dan (5) pengurangan jumlah petani miskin, terbukti dengan adanya dana PUAP kebutuhan usaha tani tercukupi melalui pembelian saprodi dan penyisihan konsumsi rumah tangga melalui renovasi pembangunan rumah.

Penilaian terhadap indikator kerjasama Gapoktan dengan lembaga lain menggunakan 4 parameter, yaitu; (1) kerjasama dengan perusahaan dalam pemanfaatan dana CSR, belum mampu dilakukan karena keterbatasan informasi dan aktivitas usaha tani; (2) kerjasama pembiayaan, sudah dilakukan melalui penyimpanan rekening dana PUAP di Bank BRI; (3) kerjasama produksi, belum dilakukan petani karena masih terbatas pada kegiatan usaha tani tanpa ada kegiatan nilai tambah melalui produksi; dan (4) kerjasama pemasaran hasil usaha anggota, dilakukan melalui pedagang-pedagang tengkulak yang sekaligus juga menjadi anggota LKMA Sejahtera.

KESIMPULAN

1. Penumbuhan LKMA pada Gapoktan PUAP dikategorikan “baik” pada tahapan persiapan. Sedangkan pada tahapan pelaksanaan dan persiapan

pengembangan LKMA, hasilnya dikategorikan “kurang baik”.

2. Efektivitas LKMA menunjukkan bahwa LKMA Gapoktan Sejahtera memiliki kinerja efektivitas “baik”. Hal itu dapat dilihat dari 4 parameter yaitu aspek organisasi aspek penyaluran dana PUAP, aspek pemanfaatan dana PUAP, dan aspek pengembalian dana PUAP yang mencapai nilai rata-rata 4.

SARAN

1. Meningkatkan peran Penyelia Mitra Tani (PMT) dalam pendampingan,
2. Mengembangkan unit otonom LKMA tidak hanya sebagai lembaga peminjaman, tapi juga tabungan,
3. Mengembangkan proses penumbuhan bisnis melalui jiwa kewirausahaan anggota untuk keberlanjutan LKMA.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. 1995. Memahami Persoalan Pasar Keuangan (Financial Market) di Wilayah Pedesaan. Dalam Agricultural Planning Vol (1). Kerjasama Indonesia Australia Eastern Universities Project dengan Universitas Mataram, Lombok.
- Berenbach S. 1997. Regulation and Supervision of Microfinance Institutions, Case Studies Edited by Craig Churchill, The Micro Finance Network Occasional Paper No. 2
- Boysen V, Richard S. 2008. The Key Success Factors of Grameen Bank—A Case Study of Strategic, Cultural

- and Structural Aspects. School of Economics and Management, Lund University. Sweden.
- Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian. 2014. Pedoman Pengembangan LKMA Gapoktan PUAP. Jakarta.
- Hendayana R, Busmatan S, Sunandar N, Jamal E. 2008. Petunjuk Pelaksanaan: Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A). Bogor (ID): Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
- Hossain, M. 1988. Credit for Alleviation of Rural Poverty: The Grameen Bank in Bangladesh. International Food Policy Research Institute (IFPRI). Research Report 65, Washington D.C.
- Kementerian Pertanian. 2010. Petunjuk Teknis Peningkatan (Rating) Gapoktan PUAP menuju LKMA. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Kementerian Pertanian. 2011. Lampiran Peraturan Menteri Pertanian, No: 29/Permentan/OT.140/5/2011, Tanggal: 30 Mei 2011 tentang Pedoman Penilaian Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Berprestasi Tahun Anggaran 2011. Jakarta.
- Seibel, H.D. and Torres, D., 1999 "Are Grameen Replicators Sustainable, and Do They Reach the Poor? The Case of Card Rural Bank in the Philippines", The Journal of Microfinance, Vol. 1, No. 1, pp. 117-130
- Yunus. 1981. Credit for Self-Employment: A Fundamental Human Right. Grameen Bank, Dhaka.

